

LAPORAN PELAKSANAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR  
PERIODE DESEMBER 2010



BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR  
KANTOR PUSAT  
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.33 SAMARINDA  
TELP. (0541) 735500 FAX. (0541) 748634

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  
BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR  
PERIODE DESEMBER 2010

1. PENDAHULUAN
2. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
3. KERTAS KERJA SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE
4. RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT  
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
5. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT  
PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE
6. LAMPIRAN - LAMPIRAN

## I. PENDAHULUAN

Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* memerlukan proses panjang dalam kegiatan operasional dan manajemen perusahaan untuk menjadi sebuah budaya tata kelola perusahaan yang baik. Menyadari pentingnya proses ini BPD Kaltim sebagai Perusahaan yang core bisnisnya berkaitan erat dengan Pemerintah Daerah dan memiliki peran yang cukup besar dalam mendorong perekonomian daerah maka mengimplementasi prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness* menjadi kebutuhan mutlak bagi aktivitas usaha BPD Kaltim. Evaluasi terhadap hal-hal pokok yang menjadi indikator penilaian selalu dilakukan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksanaan GCG. *Self assessment* memberikan gambaran secara umum atas pelaksanaan *good corporate governance* pada setiap tahunnya. Atas penilaian tersebut bank dapat menindaklanjuti setiap kekurangan dengan melakukan perbaikan-perbaikan secara bertahap.

Implementasi prinsip-prinsip GCG di BPD Kaltim memerlukan komitmen dari seluruh organ bank, mulai dari RUPS, Dewan Pengawas, Direksi, Pejabat Eksekutif dan seluruh jenjang organisasi. Komitmen dan kesadaran diperlukan untuk terus menjaga sistem tata kelola yang baik agar menjadi sebuah budaya demi kelangsungan perusahaan dalam jangka panjang. BPD Kaltim meyakini bahwa implementasi *good corporate governance* akan memberikan manfaat antara lain meningkatkan kepercayaan masyarakat, meningkatkan kinerja dan efisiensi bank serta mampu memberikan nilai tambah kepada pemegang saham dalam misinya sebagai Perusahaan Daerah dengan membantu Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### A. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance

- 1) *Transparancy* (Keterbukaan) : Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.

- 2) *Accountability* (Akuntabilitas) : Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung-jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
- 3) *Responsibility* (Tanggungjawab) : Kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- 4) *Independency* (Independensi) : Pengelolaan bank secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun.
- 5) *Fairness* (Kewajaran) : Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B. Tujuan

Penerapan *Good Corporate Governance* oleh BPD Kaltim bertujuan untuk:

- 1) Memaksimalkan nilai BPD Kaltim dengan cara menerapkan prinsip-prinsip: keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*), agar memiliki daya saing yang kuat.
- 2) Meningkatkan kinerja BPD Kaltim, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.
- 3) Mewujudkan sistem manajemen BPD Kaltim yang profesional dengan bercirikan kerja sesuai nilai-nilai dan perilaku pegawai yang dianut BPD Kaltim.
- 4) Meningkatkan kemandirian dan daya tahan organ BPD Kaltim terhadap pengaruh maupun praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*.

### C. Budaya Perusahaan

Budaya Perusahaan (corporate culture) adalah serangkaian norma-norma, nilai-nilai dan asumsi-asumsi, yang diyakini keberadaannya, dan dimiliki secara bersama (shared) dalam suatu perusahaan atau lingkungan kerja yang dimiliki individu pegawai/kelompok kerja di dalam perusahaan tersebut. Budaya Perusahaan bukan dimaksudkan sebagai pemaksaan perubahan pola sikap pribadi melainkan merupakan bimbingan untuk penerapan pola hidup kerja positif dan kuat. Budaya perusahaan BPD Kaltim adalah sikap dan perilaku BPD Kaltim, yang harus dicerminkan oleh sikap dan perilaku para pegawainya dalam mencapai misinya. Sikap dan perilaku tersebut merupakan pencerminan dari anggapan-anggapan, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada di lingkungan BPD Kaltim dimana pegawainya bekerja. Budaya Perusahaan BPD Kaltim diharapkan menjadi Etos Kerja yang harus mendapat dukungan dari setiap pegawai untuk melaksanakan secara sadar guna mencapai misi perusahaan. Oleh karena keberadaannya yang sangat penting pada perusahaan maka perlu diwujudkan secara formal dan tertulis untuk menjadi acuan bersama di seluruh jenjang organisasi ke dalam suatu butir budaya perusahaan yaitu :

Sembilan butir budaya perusahaan BPD Kaltim :

1. Bekerja dengan penuh kejujuran, disiplin tinggi, rasa tanggung jawab dan kerja keras.
2. Menguasai pengetahuan produk dan jasa BPD Kaltim dan turut membantu memasarkannya pada kesempatan-kesempatan yang ada.
3. Melayani nasabah dengan cepat, akurat, ramah, aman, dan menyenangkan.
4. Selalu berupaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan tugas/pekerjaan.
5. Mengembangkan sikap kewirausahaan, inovatif, kreatif, dan proaktif dalam tugas masing-masing.
6. Berfikir, bertindak dan bekerja secara profesional.
7. Peduli, tanggap, dan berusaha menyelesaikan masalah yang ada secara dini.
8. Bersikap terbuka, arief, toleran, luwes, akomodatif, serta menjaga keharmonisan hubungan sesama pegawai.
9. Memelihara citra Bank dengan berperilaku tertib, tampil rapi, tepat waktu, dan tidak ingkar janji.

## II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

### A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung jawab Dewan Pengawas dan Direksi, terdiri dari :

a) Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Pengawas, Direksi

No.	Keterangan	Dewan Pengawas	Direksi
1.	Jumlah	4 (empat) orang	4 (empat) orang
2.	Komposisi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ketua Dewan Pengawas sebagai Dewan Pengawas Independen - H. Abdullah Sani</li><li>• Anggota Dewan Pengawas Independen - Sugeng Hariyadi</li><li>• Anggota Dewan Pengawas - H. Ibnu Nirwani - H. Irianto Lambrie</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• H. Aminuddin : Direktur Utama</li><li>• H.Amiruddin Shahak : Direktur Umum</li><li>• H. Apriansyah : Direktur Pemasaran</li><li>• H.Zainuddin Fanani : Direktur Kepatuhan</li></ul>
3.	Kriteria	<ul style="list-style-type: none"><li>• Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li><li>• Memiliki dedikasi tinggi, cakap dan mempunyai kemampuan untuk</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</li><li>• Memiliki pengalaman kerja paling kurang 15 (lima belas) tahun pada lembaga</li></ul>

		<p>menjalankan kebijakan pemegang saham dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Bank;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki pengetahuan dibidang keuangan dan perbankan serta mempunyai akhlak dan moral yang baik;</li> <li>• Memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia;</li> </ul>	<p>keuangan/perbankan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif Bank;</li> <li>• Memenuhi persyaratan telah Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia;</li> </ul>
4.	Independensi Anggota	<p>Dewan Pengawas BPD Kaltim :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak merangkap jabatan pada 1 (satu) atau lebih lembaga/perusahaan keuangan lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>• Tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, kepemilikan saham maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas lainnya, Direksi atau hubungan dengan Bank sebagaimana ketentuan pelaksanaan GCG bagi Bank Umum;</li> <li>• Tidak memiliki saham pada BPD Kaltim maupun pada bank dan/atau perusahaan</li> </ul>	<p>Direksi BPD Kaltim :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak memiliki saham yang melebihi 25% (dua puluh lima perseratus) baik pada BPD Kaltim dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri; (sesuai data per Desember 2010)</li> <li>• Tidak memiliki hubungan keuangan, dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham pengendali BPD Kaltim;</li> <li>• Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat</li> </ul>

		lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.	Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri;
--	--	--	---

b) Tugas dan tanggung jawab

Dewan Pengawas	Direksi
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian dan pembinaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>• Memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;</li> <li>• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasehat kepada Direksi;</li> <li>• Menyetujui dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis bank;</li> <li>• Membentuk dan memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dari Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi;</li> <li>• Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola BPD Kaltim sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>• Memimpin, mengurus dan melaksanakan kebijakan umum bank sesuai dengan misi dan fungsi bank;</li> <li>• Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha pada seluruh tingkatan atau jenjang Organisasi BPD Kaltim;</li> <li>• Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dan wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS;</li> <li>• Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana termasuk diversifikasi portofolio atas penyediaan dana yang diberikan.</li> </ul>



c) Rekomendasi Dewan Pengawas

Terhadap kebijakan yang menyangkut kegiatan operasional bank Dewan Pengawas tidak pernah memberikan rekomendasi, akan tetapi dalam melakukan tugas pengawasan Dewan Pengawas mengarahkan dan memantau terhadap pelaksanaan kebijakan bank, Dewan Pengawas dapat melakukan evaluasi serta menyetujui rencana bisnis bank.

2. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite, terdiri dari :

a) Komite Audit.

a.1 struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota

- Struktur

- Ketua Komite : Dewan Pengawas Independen
- Anggota Komite : Pihak Independen, berasal dari mantan Pejabat Eksekutif BPD Kaltim yang telah melalui masa cooling off lebih dari 6 (enam) bulan.
- Anggota Komite : Pihak Independen berasal dari mantan Pejabat Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur yang telah melalui masa cooling off lebih dari 6 (enam) bulan yang memiliki keahlian di bidang keuangan (pemeriksaan keuangan).

- Keanggotaan

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Susunan keanggotaan Komite Audit pada tahun 2010 adalah:

Ketua Komite : H. Abdullah Sani  
Anggota Komite : H. Kamri Manna Tawakkal  
H. Andi Yahya Iskandar

- Keahlian

Ketua Komite : Bidang Ekonomi Keuangan dan Manajemen  
Anggota Komite 1 : Bidang Keuangan (pembukuan) dan pengawasan & pemeriksaan (audit)  
Anggota Komite 2 : Bidang Keuangan (pemeriksaan)

- Independensi

- Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali BPD Kaltim;
- Tidak merangkap jabatan pada BPD Kaltim, Bank lain, baik yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

a.2 tugas dan tanggung jawab

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit terhadap standar audit yang berlaku serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern;

- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku.
- Memantau dan mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar yang berlaku.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan dan pemberhentian Audit Ekstern;
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas SKAI terhadap Standar Audit yang berlaku
- Pemantauan/Evaluasi Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Ekstern sesuai Standar Audit yang berlaku
- Pemantauan /Evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar yang berlaku
- Pemantauan /Evaluasi Pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen/Direksi

#### a.3 frekuensi rapat

Rapat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan rapat yang dilakukan selama tahun 2010 :

#### Rapat Bulanan Komite Audit

No.	Tanggal	Anggota	Agenda Rapat
1.	2 Pebruari 2010	Komite Audit	Rapat Koordinasi
2.	10 Maret 2010	Komite Audit	Rapat Koordinasi
3.	6 April 2010	Komite Audit	Rapat Koordinasi
4.	10 Mei 2010	Komite Audit	Rapat Koordinasi
5.	7 Juni 2010	Komite Audit	Rapat Koordinasi
6.	5 Juli 2010	Komite Audit	Rapat Koordinasi
7.	4 Agustus 2010	Komite Audit	Rapat Koordinasi
8.	15 September2010	Komite Audit	Rapat Koordinasi
9.	4 Oktober 2010	Komite Audit	Rapat Koordinasi
10.	8 November 2010	Komite Audit	Rapat Koordinasi
11.	1 Desember 2010	Komite Audit	Rapat Koordinasi

#### Rapat Intern Komite Audit

No.	Tanggal	Anggota	Agenda Rapat
1.	16 Pebruari 2010	Komite Audit	Evaluasi Hasil Audit Khusus SKAI Periode Januari 2010
2.	11 Maret 2010	Komite Audit	Membahas Hasil Rapat Komite Audit tanggal 10 Maret 2010
3.	12 April 2010	Komite Audit	Evaluasi Rekomendasi dari Audit Eksternal dan Internal
4.	26 April 2010	Komite Audit	Pembahasan dan Mengevaluasi Rencana dan Program Kerja Audit dan Kebutuhan Anggaran
5.	25 Mei 2010	Komite Audit	Mengevaluasi Pelaksanaan Audit dan Kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar Akuntansi yang berlaku atas Hasil Laporan Keuangan dari Auditor Ekstern
6.	21 Oktober 2010	Komite Audit	Perkembangan tindak lanjut hasil Audit BPK RI, Bank Indonesia, BPKP Perwakilan Kaltim dan SKAI Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur
7.	20 Desember 2010	Komite Audit	Evaluasi Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku

#### a.4 program kerja dan realisasinya

Realisasi Progam Kerja Komite Audit tahun 2010 adalah :

- Penerapan GCG  
Mempelajari berbagai Peraturan/ketentuan mengenai pelaksanaan good corporate governance.

- Mengevaluasi pelaksanaan tugas SKAI terhadap Standar Audit yang berlaku :
  - a. Telah melakukan evaluasi mengenai kelengkapan Audit Intern dalam melaksanakan tugas sesuai Surat Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Pengawas BPD Kaltim No: 032/KA/BPD/XII/2010 tanggal 27 Desember 2010.
  - b. Telah dilakukan evaluasi Rencana dan Program Kerja Satuan Kerja Audit Intern BPD Kaltim Tahun Buku 2010 sesuai Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Pengawas BPD Kaltim No.005/KA/BPD/IV/2010 tanggal 26 April 2010.
  - c. Telah dilakukan evaluasi pelaksanaan kerja dan kinerja Satuan Kerja Audit Intern Tahun Buku 2010 sesuai Surat Komite Audit tanggal 8 Juli 2010.
  
- Pemantauan/Evaluasi Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Ekstern sesuai Standar Audit yang berlaku :
  - a. Rekomendasi Komite Audit penunjukan Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan BPD Kaltim Tahun Buku 2009 telah disampaikan kepada Dewan Pengawas sesuai Surat No. 27/KA/BPD-KT/XI/2010 tanggal 16 September 2010 dan Surat No.011/KA/BPD/XI/2010 tanggal 30 Agustus 2010.
  - b. Hasil Audit Akuntan Publik/Kantor Akuntan Publik Sugeng Pamudji telah dilakukan evaluasi sesuai Surat Komite Audit No.007/KA/BPD/V/2010 tanggal 25 Mei 2010.
  - c. Evaluasi Laporan Keuangan oleh Auditor Ekstern/KAP sudah terangkum dalam Surat No.007/KA/BPD/V/2010 tanggal 25 Mei 2010.
  
- Pemantauan /Evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku :
  - a. Telah melakukan evaluasi laporan keuangan sesuai Surat Komite Audit kepada Dewan Pengawas Nomor: 031/KA/BPD/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
  - b. Evaluasi kebijakan Praktek Akuntansi penting dan informasi keuangan, belum dapat dilaksanakan Tahun buku 2010, karena belum Praktek Akunting Penting yang tidak sesuai dengan standar Akuntansi.

- Pemantauan /Evaluasi Pelaksanaan tindak lanjut oleh Manajemen/Direksi :
  - a. Temuan/Rekomendasi hasil Audit SKAI telah dilakukan evaluasi sesuai Surat Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Pengawas yaitu :
    - evaluasi hasil audit khusus SKAI periode Januari 2010,
    - evaluasi tindak lanjut rekomendasi audit SKAI periode 2008-2009
    - evaluasi rekomendasi SKAI BPD Kaltim sebanyak 130 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
  - b. Telah melakukan evaluasi temuan rekomendasi Akuntan Publik/KAP yaitu :
    - melakukan evaluasi hasil Audit Kinerja BPD Kaltim oleh KAP Sugeng Pamudji sesuai surat No. 008/KA/BPD/VI/2010 tanggal 30 Juni 2010.
    - melakukan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi BPKP Perwakilan Kaltim sesuai Surat No. 028/KA/BPD/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
  - c. Evaluasi Temuan Bank Indonesia telah dilakukan sesuai Surat Komite Audit No. 028/KA/BPD/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010.
  - d. Evaluasi Temuan BPK RI telah dilakukan sesuai Surat Komite Audit No. 028/KA/BPD/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010.

Rencana Kerja Komite Audit tahun 2011 *terlampir*.

## b) Komite Pemantau Risiko

b.1 struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota

- Struktur

- Ketua Komite : Dewan Pengawas Independen
- Anggota Komite : Pihak Independen berasal dari mantan Pejabat Eksekutif Bank BPD Kaltim akan tetapi telah menjalani masa cooling off lebih dari 6(enam) bulan
- Anggota Komite : Pihak Independen berasal dari Akademisi.

- Keanggotaan

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Ketua Komite : Sugeng Hariyadi  
Anggota Komite : H. Fachruddin Gafoor  
: Sukisno S. Riadi

- Keahlian

Ketua Komite : Bidang Ekonomi  
Anggota Komite 1 : Bidang Ekonomi Keuangan dan Perkreditan  
Anggota Komite 2 : Bidang Ekonomi Managemen

- Independensi

- Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali BPD Kaltim;
- Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Komite telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta telah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

b.2 tugas dan tanggung jawab

- Mempelajari kebijakan manajemen risiko yang ditetapkan oleh perusahaan
- Memantau dan mengevaluasi laporan manajemen risiko yang dikirim ke Bank Indonesia
- Mengevaluasi kinerja Komite Manajemen Risiko dan SKMR pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko
- Menyampaikan laporan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Pengawas
- Melakukan self assessment terhadap kinerja Komite Pemantau Risiko
- Melakukan pemantauan setidaknya 4 dari 8 jenis risiko bank

b.3 frekuensi rapat

Rapat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan rapat yang dilakukan selama tahun 2010 :

No.	Tanggal	Anggota	Agenda Rapat
1.	19 Januari 2010	Komite Pemantau Risiko	Rapat Koordinasi
2.	19 Pebruari 2010	Komite Pemantau Risiko	Rapat Koordinasi
3.	5 Maret 2010	Komite Pemantau Risiko	Rapat Koordinasi
4.	30 April 2010	Komite Pemantau Risiko	Rapat Koordinasi
5.	7 Mei 2010	Komite Pemantau Risiko	Rapat Koordinasi



6.	04 Juni 2010	Komite Pemantau Risiko	Rapat Koordinasi
7.	02 Juli 2010	Komite Pemantau Risiko	Rapat Koordinasi
8.	06 Agustus 2010	Komite Pemantau Risiko	Rapat Koordinasi
9.	03 September 2010	Komite Pemantau Risiko	Rapat Koordinasi
10.	22 Oktober 2010	Komite Pemantau Risiko	Rapat Koordinasi
11.	08 November 2010	Komite Pemantau Risiko	Rapat Koordinasi
12.	10 Desember 2010	Komite Pemantau Risiko	Rapat Koordinasi
13.	14 Juni 2010	Ketua dan anggota Dewan Pengawas, Komite Pemantau Risiko, Sekretariat Dewan Pengawas dan Pemimpin Divisi Kepatuhan & Manajemen Risiko	Pembahasan Pedoman Kebijakan dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme BPD Kaltim
14.	02 Agustus 2010	Ketua dan anggota Dewan Pengawas, Direktur Pemasaran, Komite Pemantau Risiko, Sekretariat Dewan Pengawas dan Pemimpin Divisi Kredit Korporasi	Pembahasan Usulan Penetapan Perhitungan Bunga Kredit Ekstrakomtable
15.	28 Desember 2010	Ketua dan anggota Dewan Pengawas, Direktur Umum, Komite Pemantau Risiko, Sekretariat Dewan Pengawas dan Pemimpin Divisi Umum	Pembahasan Usulan Estándar Operating Procedure Business Continuity plan (SOP BCP)

#### b.4 program kerja dan realisasi

Program kerja Komite Pemantau Risiko tahun 2011 dan realisasi program kerja tahun 2010 sebagaimana terlampir.

### c) Komite Remunerasi dan Nominasi

#### c.1 struktur, keanggotaan, keahlian, dan independensi anggota

##### - Struktur

- Ketua Komite : Dewan Pengawas Independen
- Anggota Komite : Anggota Dewan Pengawas BPD Kaltim
- Anggota Komite : Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia (Pemimpin Divisi Sumber Daya Manusia BPD Kaltim)

##### - Keanggotaan

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko adalah 3(tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan berikutnya.

Ketua Komite : H. Abdullah Sani  
Anggota Komite : H. Ibnu Nirwani  
: H. Hairuzzaman

##### - Keahlian

Ketua Komite : Bidang Ekonomi Keuangan dan Manajemen  
Anggota Komite 1 : Bidang Ekonomi Keuangan  
Anggota Komite 2 : Bidang Ekonomi Manajemen

- Independensi

- Tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi dan/atau Pemegang saham Pengendali BPD Kaltim;
- Rangkap jabatan yang dimiliki oleh anggota Komite telah memperhatikan kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta telah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

c.2 tugas dan tanggung jawab

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Pengawas mengenai kebijakan remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi serta pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas dan Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Pengawas dan/atau Direksi kepada Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota komite kepada Dewan Pengawas.

c.3 frekuensi rapat

Rapat dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan dan rapat yang dilakukan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2010 adalah :

No.	Tanggal	Anggota	Agenda Rapat
1.	07 Januari 2010	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Koordinasi

2.	03 Pebruari 2010	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Koordinasi
3.	09 Maret 2010	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Koordinasi
4.	08 April 2010	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Koordinasi
5.	06 Mei 2010	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Koordinasi
6.	08 Juni 2010	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Koordinasi
7.	06 Juli 2010	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Koordinasi
8.	05 Agustus 2010	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Koordinasi
9.	02 September 2010	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Koordinasi
10.	05 Oktober 2010	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Koordinasi
11.	09 November 2010	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Koordinasi
12.	02 Desember 2010	Komite Remunerasi dan Nominasi	Rapat Koordinasi
13.	04 Januari 2010	Ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas, Seluruh Anggota Komite dan Sekretariat Dewan Pengawas	Pembahasan Hasil Pemeriksaan Bank Indonesia
14.	02 Maret 2010	Ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas, Komite Remunerasi & Nominasi, Pin.div Perencanaan & Pengembangan dan Sekretariat Dewan Pengawas	Pembahasan Perubahan struktur organisasi
15.	15 Maret 2010	Ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas, seluruh anggota Komite dan Sekretariat Dewan Pengawas	Pembahasan masa tugas anggota Komite
16.	05 April 2010	Ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas, seluruh anggota Komite, Divisi Usaha Syariah dan Sekretariat Dewan Pengawas	Pembahasan tugas dan kinerja unit kerja Divisi Usaha Syariah dan Divisi TI dan Akuntansi
17.	26 Juli 2010	Ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas, Komite Pemantau Risiko, Komite	Pembahasan SOP Sistem Penilaian Kinerja dan Potensi Pegawai

		Remunerasi&Nominasi dan Sekretariat Dewan Pengawas	
18.	10 Agustus 2010	Ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas, Direktur Kepatuhan, Komite Remunerasi&Nominasi dan Sekretariat Dewan Pengawas	Pembahasan Usulan Perubahan Sistem Penggajian
19.	24 Agustus 2010	Ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas, Komite Remunerasi&Nominasi dan Sekretariat Dewan Pengawas	Pembahasan Rencana Mutasi Pejabat Eksekutif termasuk persetujuan pengangkatan dan/atau penggantian Kepala SKAI
20.	03 September 2010	Ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas, Komite Remunerasi&Nominasi dan Sekretariat Dewan Pengawas	Pembahasan Usulan Direksi Tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya
21.	27 Desember 2010	Ketua Dewan Pengawas, anggota Dewan Pengawas, Komite Remunerasi&Nominasi dan Sekretariat Dewan Pengawas	Pembahasan Usulan Perubahan Sistem Penggajian Direksi

#### c.4 program kerja dan realisasinya

Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2011 dan realisasi program kerja tahun 2010 sebagaimana terlampir.

### 3. Penerapan Fungsi :

#### a) Fungsi Kepatuhan

- 1) Dalam rangka penerapan kepatuhan Bank terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bank telah menunjuk seorang Direktur Kepatuhan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan Bank Indonesia tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan secara berkala melaporkan tugas Direktur Kepatuhan kepada Direktur Utama dan setiap semester melaporkan ke Bank Indonesia.
- 2) Guna mendukung pelaksanaan fungsi Direktur Kepatuhan, Bank telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (Departemen Kepatuhan) pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko yang bersifat independen terhadap satuan kerja operasional.
- 3) Direktur Kepatuhan memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dalam hal :
  - a. Pencapaian Standar Indikator Utama Perbankan
    - Tingkat kesehatan BPD Kaltim dengan mempertahankan tingkat kecukupan modal Bank atau Capital Adequacy Ratio (CAR) diatas 8%. Besarnya CAR posisi Desember 2010 adalah sebagai berikut : (sesuai data profil risiko posisi Desember 2010)

Besarnya CAR dengan memperhitungkan :	31 Des 2010
Risiko Kredit	19,73%
Risiko Kredit dan Risiko Pasar	19,70%
Risiko Kredit, Risiko Pasar dan Risiko Operasional termasuk Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan	18,09%

- Non Performing Loan (NPL) sesuai ketentuan yaitu maksimal 5% dan realisasi NPL Bank Rupiah dan Valuta Asing sampai dengan posisi Desember 2010 adalah sebagai berikut :

(sesuai data Divisi Perkreditan sampai dengan posisi Desember 2010)

Posisi Akhir Bulan :	NPL
a. Januari 2010	2,71%
b. Februari 2010	2,59%
c. Maret 2010	4,04%
d. April 2010	2,78%
e. Mei 2010	3,85%
f. Juni 2010	3,02%
g. Juli 2010	2,95%
h. Agustus 2010	3,37%
i. September 2010	3,12%
j. Oktober 2010	5,23%
k. November 2010	3,54%
l. Desember 2010	3,30%

- Pemantauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Bank sampai dengan Desember 2010 tidak terjadi pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana Peraturan Bank Indonesia No.7/3/PBI/2005 dan Perubahannya No.8/13/PBI/2006 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit. (sesuai data Divisi Perkreditan sampai dengan posisi Desember 2010)
- Giro Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia tidak kurang dari ketentuan yang berlaku, dan sampai dengan posisi Desember 2010 realisasi GWM BPD Kaltim adalah sebagai berikut :

Periode (akhir bulan)	BPD Kaltim		BPD Kaltim Syariah	
	Rupiah	Valuta Asing	Rupiah	Valuta Asing
a. Januari 2010	5,04%	2,07%	5%	1%
b. Februari 2010	5,04%	4,85%	5%	1%
c. Maret 2010	5,01%	3,67%	5%	1%
d. April 2010	5,02%	4,05%	5%	1%
e. Mei 2010	5,02%	4,98%	5%	1%
f. Juni 2010	5,01%	3,18%	5%	1%
g. Juli 2010	5,03%	3,16%	5%	1%
h. Agustus 2010	5,02%	3,44%	5%	1%
i. September 2010	5,01%	2,86%	5%	1%
j. Oktober 2010	5,01%	3,19%	5%	1%
k. November 2010	8,01%	4,33%	5%	1%
l. Desember 2010	8,03%	5,47%	5%	1%

- Posisi Devisa Netto (PDN) Bank tidak melebihi 20% sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Posisi Akhir Bulan	PDN (Neraca)	PDN (Keseluruhan)
a. Januari 2010	4,92%	2,06%
b. Februari 2010	5,03%	2,16%
c. Maret 2010	4,55%	1,54%
d. April 2010	5,55%	2,59%
e. Mei 2010	4,18%	1,44%
f. Juni 2010	5,02%	2,32%



g. Juli 2010	5,87%	2,80%
h. Agustus 2010	5,72%	2,61%
i. September 2010	8,55%	6,43%
j. Oktober 2010	5,27%	3,04%
k. November 2010	2,53%	0,10%
l. Desember 2010	2,97%	0,73%

b. Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan lainnya :

- Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Direktur Utama dan Bank Indonesia.
- Direktur Kepatuhan melalui Departemen Kepatuhan (Satuan Kerja Kepatuhan) pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan pemantauan atas pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia pada Divisi dan Kantor Cabang BPD Kaltim.
- Menyampaikan laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah.
- Melakukan pemantauan dan sosialisasi Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Melakukan pemantauan pelaksanaan Penerapan Prinsip-prinsip GCG dalam kegiatan usaha BPD Kaltim dengan :
  - Melakukan self assesment pelaksanaan GCG.
  - Menyampaikan tindak lanjut temuan self assessment GCG oleh auditor ekstern kepada unit yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti.
- Pemantauan atas Pelanggaran yang pernah terjadi selama tahun 2010 :
  - Pelanggaran terhadap Peraturan Bank Indonesia terkait keterlambatan penyampaian laporan.
  - Fraud yang dilakukan oleh karyawan dan saat ini sedang dalam proses penyelesaian.

#### b) Fungsi Audit Intern

- BPD Kaltim telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek dan unsur kegiatan bank secara efektif dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum.
- Sebagai efektifitas pelaksanaan fungsi audit intern telah dibentuk Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) yang independen terhadap satuan kerja operasional, beserta Kontrol Intern Cabang (KIC) di Kantor Cabang BPD Kaltim yang bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas SKAI dalam melakukan fungsinya.
- Bank telah memiliki Standart Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan menyusun piagam audit intern (Internal Audit Charter) sesuai Surat Keputusan Direksi BPD Kaltim No. 154/SK/BPD-PST/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007.
- Menyusun panduan audit intern, sebagaimana tertuang dalam Buku Pedoman Perusahaan tentang Organisasi Satuan Kerja Audit Intern.
- SKAI telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

#### c) Fungsi Audit Ekstern

- Dalam melakukan audit laporan keuangan, Bank telah menunjuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur sebagai Akuntan Publik.
- Penunjukan Akuntan Publik dalam rangka audit laporan keuangan tahunan berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Pengawas untuk memperoleh persetujuan RUPS.
- BPKP sebagai Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi Standard profesional Akuntan Publik, dan memiliki perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang telah ditetapkan.

#### d) Penerapan Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern

##### d.1 Pengawasan Aktif Dewan Pengawas dan Direksi Bank

Pengawasan aktif Dewan Pengawas dan Direksi Bank, dilaksanakan melalui antara lain:

- Evaluasi atas Rencana Bisnis Bank, dimana rencana bisnis tersebut merupakan kebijakan manajemen risiko Bank secara menyeluruh.
- Melalui Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi atas Laporan Profil Risiko Bank yang disampaikan oleh Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko.
- Adanya pemantauan atas kepatuhan terhadap limit risiko yang telah ditetapkan oleh Bank.

##### d.2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan manajemen risiko Bank, dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank. Dimana didalamnya terdapat penentuan batas risiko kredit yang dapat diterima antara lain *Non Performing Loans* (NPL), penyediaan dana baik kepada sektor ekonomi maupun pihak terkait dan tidak terkait, Loan to Deposit Rasio (LDR), GWM, dan PDN.

##### d.3 Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko

Proses manajemen risiko Bank dapat dikatakan cukup memadai meski mengalami penurunan kualitas dalam penerapannya, hal ini ditandai dengan adanya peningkatan risiko inheren pada aktivitas perkreditan, operasional dan jasa, perencanaan strategis, dan pemenuhan peraturan Bank Indonesia masih terdapat kelemahan dalam pengelolaan risikonya.

#### d.4 Sistem Pengendalian Intern

Cakupan sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko Bank, dapat dinilai sebagai berikut:

- Pengendalian intern secara keseluruhan masih dilaksanakan oleh satuan kerja audit intern melalui Kontrol Intern Cabang (KIC). Namun untuk Divisi kredit terdapat unit yang melakukan pemantauan dan pengendalian atas kredit yang diberikan;
- Terdapat penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur, dan limit;
- Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari satuan kerja operasional kepada SKAI dan KIC.
- Terdapat struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas kegiatan usaha Bank;
- Untuk pelaporan keuangan dan kegiatan operasional dapat dikatakan cukup akurat dan tepat waktu;
- Prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku belum cukup memadai;
- Belum terdapat review yang efektif, independen, dan obyektif terhadap prosedur penilaian kegiatan operasional Bank;
- Belum terdapat pengujian dan review yang memadai terhadap sistem informasi manajemen;
- Dokumentasi atas cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) dan Sekretariat Dewan Pengawas;
- Terdapat verifikasi dan review secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material dan tindakan pengurus Bank untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

#### e) Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*)

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (jutaan rupiah)
			Rp
1.	Kepada Pihak Terkait	15	3.329
2.	Kepada debitur inti :		
	b. Individu	9	1.146.683
	c. Group	16	2.360.373
		Total	<u>3.510.385</u>

f) Rencana Strategis Bank

f.1 rencana jangka panjang (*corporate plan*);

Bank telah menyusun rencana jangka panjang (*corporate plan*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum.

f.2 rencana jangka menengah dan pendek (*business plan*)

Bank membuat *business plan* sebagaimana ketentuan Peraturan Bank Indonesia tentang Rencana Bisnis Bank Umum, gambaran umum *business plan* serta realisasinya pada tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Permodalan

Posisi permodalan Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur posisi Desember 2010 adalah sebesar 18,11% dengan memperhitungkan risiko kredit dan risiko operasional. Posisi tersebut menyimpang sebesar

5,88% dari target rencana bisnis yaitu sebesar 23,99% yang disebabkan antara lain adanya kenaikan pinjaman yang diberikan sebesar Rp. 1.1 Triliun dari rencana bisnisnya.

#### Kualitas Aset

Realisasi aktiva produktif Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur sesuai data per Desember 2010 pada penempatan Bank Indonesia, antar bank aktiva, kredit yang diberikan, surat berharga yang dimiliki, penyertaan, dan tagihan lainnya total sebesar Rp. 14.979.512 juta dengan rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif sebesar 3,19%, sedangkan rencana bisnis aktiva produktif Bank Pembangunan daerah Kalimantan Timur per akhir Desember 2010 adalah sebesar Rp. 15.445.856 juta dengan rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif sebesar 0,83%. Hal ini terjadi penurunan kualitas aktiva produktif terhadap aktiva produktif sebesar 2,36% yang disebabkan adanya peningkatan aktiva produktif yang tidak diikuti oleh perbaikan kualitas aktiva produktif. Posisi rasio NPL pada Desember 2010 adalah 3,30% menyimpang dari target rencana bisnis yaitu sebesar 1,14% akibat dari masih tingginya kredit bermasalah yang dihadapi Bank.

#### Rentabilitas

Rencana bisnis tahun 2010 terhadap laba pada tahun berjalan ditargetkan sebesar Rp. 530.346 juta, dimana terdapat deviasi sebesar 1,61% dari realisasi yaitu sebesar Rp. 521.797 juta (setelah pajak) dengan rasio-rasio rentabilitas sebagai berikut :

RASIO	RENBIS 2010	REALISASI 2010
Return On Assets (ROA)	3,99%	4,57%
Return On Equity (ROE)	26,48%	26,38%
Net Interest Margin (NIM)	7,55%	6,98%
BOPO	64,61%	71,46%

(sesuai data laporan realisasi rencana bisnis triwulan IV tahun 2010)

#### Likuiditas

Realisasi rasio LDR (*Loan to Deposit Ratio*) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur per Desember 2010 atas pinjaman yang diberikan dibandingkan dengan total Dana Pihak Ketiga adalah sebesar 80,66%, sedangkan rencana bisnis yang ditargetkan adalah sebesar 59,08%, dimana terjadi penyimpangan sebesar 21,58% yang diakibatkan antara lain adanya peningkatan kredit yang diberikan sebesar 13,59% dari rencana bisnis dan penurunan posisi DPK sampai dengan 16,80% dari rencana bisnis.

#### Total Asset

Total asset Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur per Desember 2010 terealisasi sebesar Rp. 15.027.759 juta dimana rencana bisnis yang ditargetkan adalah sebesar Rp. 16.549.452 juta, realisasi tersebut menimbulkan penyimpangan (deviasi) negatif sebesar 9,19%. Penurunan asset ini dikarenakan adanya penurunan Dana Pihak Ketiga yang berasal dari deposito sebesar 10,96% atau sebesar Rp.464.013 juta dan giro sebesar 36,34% atau sebesar Rp. 2.774.716 juta dari rencana bisnis pada triwulan keempat tahun 2010.

#### g) Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

- Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders dan mempublikasikannya melalui media lokal surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat Bank.
- Bank menyusun laporan keuangan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia serta menyampaikannya kepada Bank Indonesia.
- Bank mentransparansikan informasi produk dan tata cara pengaduan nasabah secara cukup memadai sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- Mentransparansikan informasi produk dan tata cara pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.

- Bank menyusun laporan pelaksanaan good corporate governance dengan cakupan sebagaimana ketentuan yang berlaku dan menyajikannya dalam homepage bank [www.bankaltim.co.id](http://www.bankaltim.co.id).

## B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

No.	Kepemilikan Saham mencapai 5% (lima perseratus) di :	Dewan Komisaris	Direksi
1.	BPD Kaltim	-%	-%
2.	Bank Perkreditan Rakyat	-%	13,33 %
3.	Bank lain	-%	-%
4.	Lembaga Keuangan Bukan Bank	-%	-%
5.	Perusahaan lainnya	-%	-%
	Total	-%	13,33 %

Catatan : Dewan Pengawas dan Direksi BPD Kaltim secara individu maupun bersama-sama belum mempunyai kepemilikan saham yang mencapai 25% (dua puluh lima persen).

## C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

- Sesama anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendalinya tidak memiliki hubungan keuangan sebagaimana dalam Surat Pernyataan.
- Sesama Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi tidak memiliki hubungan kepengurusan dimana anggotanya tidak menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau Direksi pada perusahaan dimana anggota Dewan Pengawas Bank menjadi anggota dewan Pengawas dan/atau anggota Direksi.
- Anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi belum memiliki saham masing-masing maupun secara bersama-sama sampai dengan 25% (dua puluh lima persen)



- Sesama anggota Dewan Pengawas dan sesama anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan good corporate governance.

#### D. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI

##### d.1 jenis remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Dewan Pengawas dan Direksi

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 Tahun			
		Dewan Pengawas		Direksi	
		orang	jutaan Rupiah	orang	jutaan Rupiah
1.	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	4	2,458	4	10,691
2.	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang*) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	1	60	4	1,466
	Total		2,518		12,157

\*) Dinilai dalam ekivalen Rupiah

d.2 remunerasi jumlah anggota Dewan Pengawas dan Direksi selama 1 (satu) tahun dalam kisaran tingkat penghasilan

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Pengawas
di atas Rp 2 miliar	-	-
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	4	-
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	1
Rp 500 juta ke bawah	-	3

\*) yang diterima secara tunai

#### E. SHARES OPTION

Keterangan>Nama		Jumlah saham yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
			Yang diberikan (lembar saham)	Yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Dewan Pengawas	(nama)	-	-	-	-	-
Direksi	(nama)	-	-	-	-	-
Pejabat Eksekutif	(total)	-	-	-	-	-
Total						

Catatan : Selama tahun 2010 sebagaimana Anggaran Dasar, Bank tidak memiliki kebijakan atas share option sehingga tidak terdapat jumlah saham yang dapat dimiliki oleh Dewan Pengawas, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

## F. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

No.	Gaji	Rasio
1.	Gaji Pegawai tertinggi dan terendah	5,97 : 1
2.	Gaji Direksi tertinggi dan terendah	1,25 : 1
3.	Gaji Dewan Pengawas tertinggi dan terendah	1,44 : 1
4.	Gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi	4,21 : 1

Catatan : Rasio gaji dihitung berdasarkan penghasilan bruto pada daftar gaji pengurus dan pegawai bulan Desember 2010.

## G. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

No.	Rapat	Waktu
1.	Rapat Dewan Pengawas	1 (satu) bulan sekali
2.	Rapat Dewan Pengawas dengan Direksi	3 (tiga) bulan sekali
3.	Rapat Dewan Pengawas lainnya yang dianggap perlu	Insidentil

Selama tahun 2010 agenda rapat yang telah dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

### AGENDA RAPAT DEWAN PENGAWAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2010

No.	Tanggal Rapat	Keterangan
1.	12 Januari 2010	Rapat Bulanan (Bulan Desember 2009)
2.	08 Februari 2010	Rapat Bulanan ( Bulan Januari 2010)

3.	15 Maret 2010	Rapat Bulanan ( Bulan Februari 2010)
4.	12 April 2010	Rapat Bulanan ( Bulan Maret 2010)
5.	11 Mei 2010	Rapat Bulanan ( Bulan April 2010)
6.	10 Juni 2010	Rapat Bulanan ( Bulan Mei 2010)
7.	08 Juli 2010	Rapat Bulanan ( Bulan Juni 2010)
8.	10 Agustus 2010	Rapat Bulanan ( Bulan Juli 2010)
9.	06 September 2010	Rapat Bulanan ( Bulan Agustus 2010)
10.	07 Oktober 2010	Rapat Bulanan ( Bulan September 2010)
11.	11 November 2010	Rapat Bulanan ( Bulan Oktober 2010)
12.	15 Desember 2010	Rapat Bulanan ( Bulan November 2010)
13.	03 Maret 2010	Rapat Triwulan IV Tahun 2009
14.	29 April 2010	Rapat Triwulan I Tahun 2010
15.	09 agustus 2010	Rapat Triwulan II Tahun 2010
16.	01 November 2010	Rapat Triwulan III Tahun 2010

#### H. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (*INTERNAL FRAUD*)

(satuan)

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Pengurus		Pejabat Eksekutif		Pegawai Tetap		Pegawai tidak tetap	
	Thn sblmnya	Thn berjalan	Thn sblmnya	Thn berjalan	Thn sblmnya	Thn berjalan	Thn sblmnya	Thn berjalan
Total Fraud	-	-	-	-	-	3	1	-
Telah diselesaikan		-		-		2	-	-

Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	1	1	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-	-	-

#### I. PERMASALAHAN HUKUM

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total		

Catatan : Selama tahun 2010 tidak terdapat permasalahan hukum.

J. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
-	-	-	-	-	

\*) Tidak sesuai sistim dan prosedur yang berlaku

Catatan : Selama tahun 2010 Bank tidak mengalami benturan kepentingan atas kebijakan yang diambil.

K. BUY BACK SHARES DAN BUY BACK OBLIGASI BANK

-

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Pemberian Dana Untuk :	Keterangan	Nilai
Kegiatan Sosial	1. Bantuan Sosial	Rp. 549.965.000,-
	2. Penghijauan	Rp. 183.992.213,-

	3. Bantuan Bencana Alam	Rp. 25.000.000,-
Total		Rp. <u>758.957.213,-</u>
Kegiatan Politik	-	-
Total		-

Catatan : Sebagaimana ketentuan yang berlaku pada BPD Kaltim (code of conduct), tidak diperkenankan memberikan dana untuk kegiatan politik.

## V. KESIMPULAN UMUM HASIL SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Hasil penilaian kertas kerja pelaksanaan self assessment good corporate governance disimpulkan secara umum dari beberapa indikator penilaian adalah sebagai berikut :

### NILAI KOMPOSIT DAN PREDIKAT

Perhitungan nilai komposit self assessment good corporate governance Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur terhadap 11 (sebelas) faktor kriteria adalah 2,47 dengan predikat komposit baik yang mana pelaksanaan tata kelola perusahaan (good corporate governance) BPD Kaltim dalam kategori memadai. Predikat ini sama dengan tahun sebelumnya meskipun terdapat penurunan pada beberapa faktor. Nilai komposit dihitung berdasarkan faktor-faktor yang menjadi kriteria penilaian dengan skala 1 s.d. 5 dimana semakin kecil nilai komposit maka semakin baik predikatnya.

### PERINGKAT MASING-MASING FAKTOR

Terhadap aspek-aspek indikator self assessment good corporate governance, rata-rata faktor berada pada peringkat kedua sesuai dengan kriteria sebagaimana Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum dengan akumulasi penilaian sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas berada pada peringkat ke- 2 (dua)
- b. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi berada pada peringkat ke- 2 (dua)
- c. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite berada pada peringkat ke- 3 (tiga)
- d. Penanganan Benturan Kepentingan pada peringkat ke- 3 (tiga)
- e. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank pada peringkat ke- 3 (tiga)
- f. Penerapan Fungsi Audit Intern pada peringkat ke- 2 (dua)
- g. Penerapan Fungsi Audit Ekstern pada peringkat ke- 2 (dua)



- h. Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern pada peringkat ke- 3 (tiga)
- i. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures) pada peringkat ke- 4 (empat)
- j. Transparansi Kondisi Keuangan & Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal pada peringkat ke- 2 (dua)
- k. Rencana Strategis Bank pada peringkat ke- 2 (dua)

**KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA, ACTION PLAN DAN TARGET WAKTU PENYELESAIAN**

Beberapa kelemahan kecukupan pelaksanaan good corporate governance periode tahun 2009 sesuai dengan self assessment yang telah dilakukan yaitu :

No.	Kelemahan	Penyebab	Action Plan	Waktu Penyelesaian
1.	Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern	Kebijakan dan prosedur manajemen risiko belum diterapkan secara memadai.	Bank melalui departemen manajemen risiko melakukan evaluasi atas kebijakan dan prosedur manajemen risiko untuk dilakukan revisi.	Sampai dengan Juni 2011
2.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) Dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposures)	Bank belum mengatur secara jelas atas penyediaan dana besar	Bank perlu melakukan evaluasi atas kebijakan internal terkait dengan penyediaan dana besar.	Sampai dengan Agustus 2011

3.	Pemahaman good corporate governance	Pemahaman pegawai terhadap peranan budaya perusahaan (code of conduct) sebagai dasar pelaksanaan GCG belum secara menyeluruh	Pengurus akan melakukan sosialisasi secara berkesinambungan mengenai pentingnya budaya perusahaan untuk menunjang implementasi good corporate governance di seluruh jenjang organisasi	Sepanjang tahun pada setiap kesempatan pengurus akan melakukan sosialisasi GCG (code of conduct)
----	-------------------------------------	--	--	--

### PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

BPD Kaltim menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance di setiap kegiatan usahanya dan seluruh jenjang organisasi. Implementasi dari prinsip-prinsip tersebut dilakukan melalui analisis self assessment terhadap faktor-faktor yang menjadi tolak ukur dalam melaksanakan suatu tata kelola perusahaan yang baik. Dari hasil analisis self assessment tersebut akan diketahui kelemahan yang menjadi kendala dalam implementasinya.

Untuk memenuhi faktor-faktor pelaksanaan GCG, BPD Kaltim telah memiliki pedoman good corporate governance yang didalamnya mengatur RUPS, Pedoman Kerja dan Etika Kerja untuk Dewan Pengawas dan Direksi, Pedoman Komite-Komite, serta Pedoman Etika Perilaku (code of conduct) perusahaan. Selain itu sebagai alat kelengkapan fungsinya Dewan Pengawas telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi. Namun demikian, dengan telah terpenuhinya unsur-unsur good corporate governance dari hasil self assessment masih terdapat beberapa kriteria indikator yang menjadi kelemahan. Hal-hal yang menjadi kekurangan dalam menerapkan suatu tata kelola yang baik secara bertahap akan terus diperbaiki dan dilengkapi karena penerapan prinsip-prinsip good corporate governance (*transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan fairness*) tidak bisa dilakukan secara serta merta akan tetapi melalui proses yang panjang dan berkesinambungan.

Demikian kesimpulan umum pelaksanaan good corporate governance BPD Kaltim ini disusun, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Samarinda, 29 Maret 2011

BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR

KETUA DEWAN PENGAWAS,

DIREKTUR UTAMA,

Drs. H. ABDULLAH SANI

H. AMINUDDIN